

**PERSEPSI PESERTA DIDIK TENTANG PILKADA DI
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
(Studi Kasus SMA Negeri 1 Batang Angkola)**

TESIS



Oleh:

**RISWANDI HARAHAHAP
NIM 19991**

Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh
gelar Magister Pendidikan

**KONSENTRASI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN IPS
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2013**

ABSTRACT

RISWANDI HARAHAAP, 19991, Students' Perception of Election in South Tapanuli (Case Study SMA Negeri 1 Batang Angkola), Thesis, Graduate Program. State University of Padang.

The aim of this study is to analyze of students' perceptions of election at SMA Negeri 1 Batang Angkola in South Tapanuli. In addition, this study also to describe the students' understanding of the rules of local elections in South Tapanuli regency.

The method of the study is qualitative methods. The researcher used purposive sampling technique to conduct the informants. Data is collected by using observation, interview and documentation. The validation of the data used triangulation and Miles and Hubberman method in analyzing the data. It consists of data reduction, presentation and verification or conclusions.

The result of the research shows that students' perception toward the elections in South Tapanuli Regency have different perceptions. In general, the students assume that election is only for the adults. It can be concluded that the students' hopeness in election will produce officer in South Tapanuli who always prioritize public interest not others (group/class/party), honest and most importantly, free from corruption that will create a better order of life, especially economic and social welfare.

Keyword : Students' Perception, Election

ABSTRAK

RISWANDI HARAHAHAP, 19991, Persepsi Peserta Didik Tentang Pilkada Di Kabupaten Tapanuli Selatan (Studi Kasus SMA Negeri 1 Batang Angkola), Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Padang (UNP).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi peserta didik di SMA Negeri 1 Batang Angkola tentang Pilkada di Kabupaten Tapanuli Selatan. Selain itu penelitian ini juga untuk mendeskripsikan pemahaman siswa tentang aturan Pemilihan Kepala Daerah khususnya di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penetapan informan penelitian dilakukan secara Purposive sampling. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik menjamin keabsahan data penelitian ini menggunakan triangulasi, Analisa data model metode Miles dan Hubberman dengan menggunakan tiga langkah yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau kesimpulan.

Dalam kenyataan sesuai dengan hasil temuan peneliti bahwa persepsi peserta didik terhadap pelaksanaan pilkada di Kab. Tapanuli Selatan memiliki persepsi yang berbeda secara umum dari hasil analisis peneliti para peserta didik menganggap Pilkada hanya untuk kalangan orang dewasa. Dari hasil peneliti ini dapat disimpulkan bahwa harapan umum peserta didik adalah dengan adanya pemilihan kepala daerah di Kabupaten Tapanuli Selatan ini akan menghasilkan kepala daerah yang selalu memprioritaskan kepentingan masyarakat di atas kepentingan lainnya (kelompok/golongan/partai), memiliki sifat jujur dan yang terpenting adalah bebas dari KKN sehingga akan tercipta tatanan kehidupan yang lebih baik diberbagai bidang terutama perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci : Persepsi Peserta Didik, Pemilukada

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah !

Syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini dengan judul : **“Persepsi Peserta Didik Tentang Pilkada di Kabupaten Tapanuli Selatan”** Tesis ini ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan (M.Pd.) pada Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial dengan Konsentrasi Pendidikan Kewarganegaraan Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Padang.

Dalam penulisan tesis ini penulis banyak mendapat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Isnarmi Moeis, M.Pd, M.A, selaku dosen pembimbing I dan Ibu Dra. Hj. Fitri Eriyanti, M.Pd.,Ph.D., sebagai dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan.
2. Dr. Hj. Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum, Bapak Dr. Afriva Khaidir, MAPA., Ph.D. dan Bapak Dr. Jasrial, M.Pd., selaku kontributor yang telah memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran melalui saran dan kritikan agar tesis ini dapat lebih baik.
3. Prof. Dr. Mukhaiyar, M.Pd., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang, Prof. Dr. Gusril, M.Pd., selaku Asisten I dan Prof. Dr. Rusdinal selaku Asisten II serta segenap dosen dan staf pegawai

Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Padang yang telah memberikan kemudahan dan fasilitas selama penulis mengikuti pendidikan.

4. Bapak kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan dan seluruh informan yaitu Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Batang Angkola, Bapak/Ibu Guru dan Peserta Didik SMA Negeri 1 Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.
5. Istri tercinta, Hj. Nelmiani Hasibuan dan Anak-Anak tercinta yang selalu memberikan doa, dorongan dan harapan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
6. Rekan-rekan mahasiswa PPS UNP, teristimewa rekan Program Studi IPS konsentrasi PKn Angkatan 2010/2011 yang telah memberikan motivasi dan bantuannya dalam penyelesaian studi ini.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah berperan dalam memberikan bantuan materil maupun moril dalam penyelesaian tulisan ini.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan pahala dari Allah SWT. Akhirnya penulis mengharapkan saran dan kritikan yang konstuktif demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak.

Padang, Oktober 2013
Penulis

RISWANDI HARAHAAP
19991

DAFTAR ISI

ABSTRACT	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN AKHIR	iii
PERSETUJUAN KOMISI	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii

BAB I : PENDAHULUAN

A. LatarBelakangMasalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Perumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori	11
1. Sistem Demokrasi Politik	11
2. Pendidikan Demokrasi	19
3. Demokrasi dan Perilaku Demokrasi	28
4. Peserta Didik Sebagai Pemilih Pemula dalam Pilkada	37
5. Pemilihan Kepala Daerah	45
a. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah	45
b. Tata Aturan Pemilihan Kepala Daerah	48
c. Asas Pemilihan Kepala Daerah Langsung.....	50
d. Sistem Pemilihan Kepala Daerah Langsung.....	51
e. Tahap Pemilihan Kepala Daerah Langsung	54
f. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Langsung	55

6. Persepsi.....	58
a. Pengertian Persepsi.....	58
b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi	63
B. Penelitian yang Relevan	69
C. Kerangka Konseptual	70

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	73
B. Lokasi Penelitian	73
C. Informan Penelitian	74
D. Teknik dan Alat Pengumpul Data	74
E. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	76
F. Teknik Analisis Data	77

BAB IV : HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum Penelitian.....	79
1. Letak dan Keadaan Geografis.....	79
2. Sejarah Kab. Tapanuli Selatan.....	79
3. SMA Negeri 1 Batang Angkola.....	86
B. Temuan Khusus	93
1. Persepsi Peserta Didik Terhadap Aturan Pilkada	93
2. Persepsi Siswa Terhadap Pelaksanaan Pilkada.....	97
3. Bentuk Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pilkada di Tapanuli Selatan	102
4. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Pemilih Pemula Dalam Pilkada	104
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	116
1. Persepsi Peserta Didik Tentang Pelaksanaan Pilkada di Kab. Tapanuli Selatan.....	120
2. Persepsi Peserta Didik Tentang Aturan Pilkada di Kab. Tapanuli Selatan.....	128

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	150
B. Saran	151

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akhir-akhir ini Pemilihan kepala daerah menjadi bahan pembicaraan yang sangat hangat dalam konsepsi demokrasi di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara dengan sistem demokrasi yang termasuk besar di antara beberapa negara di dunia yang menjalankan sistem demokrasi. Pada dasarnya Indonesia dengan sistem demokrasi bila dipandang dari sudut pandang multirasial yang ada di Indonesia, sangatlah efektif sekali. Sebab tata pemerintahan yang dibangun akan menjadi nyaman karena duduk berdasarkan pilihan seluruh warga negara Indonesia.

Akan tetapi pada aplikasinya, pelaksanaan demokrasi di Indonesia cenderung menjadi mainan para oknum tertentu, terutama di Tapanuli Selatan Padang Sidempuan, Dari hasil wawancara penulis dengan sdr Akhiril Pane, M.Pd, mengemukakan:

Para siswa cenderung acuh tak acuh terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Pane menjelaskan, nampaknya para siswa sama sekali tidak paham apa arti penggunaan hak pilih” tukasnya. Pane menyatakan pihaknya telah banyak melakukan pendekatan melalui sosialisasi ke beberapa sekolah menengah atas. Lebih lanjut pane menjelaskan, mudah-mudahan dengan sosialisasi ini, meningkatkan kesadaran para siswa untuk ikut dalam pemilihan kepala daerah pada tahun mendatang (wawancara dilaksanakan saat penulis melakukan studi pendahuluan pada tanggal 15 januari 2012).

Saat sekarang bisa kita lihat, maraknya para elit politik yang duduk dalam kursi strategis pemerintahan yang banyak mengorbankan kepentingan

rakyat. Misalnya program yang hanya menyentuh kalangan tertentu saja, seperti: BLT, layanan kesehatan miskin yang sangat susah untuk diperoleh oleh kalangan rakyat biasa. Oleh sebab itu, banyak asumsi masyarakat biasa bahwa, “sulitnya jadi orang miskin tapi masih lebih sulit lagi menyatakan diri kita miskin (Koran Tempo, Edisi ke 12. 2007:34)”.

Dalam penghitungan suara, satu suara saja sangat berarti karena bisa mempengaruhi kemenangan politik. Apalagi suara yang berjumlah jutaan sebagaimana halnya yang dimiliki kalangan pemilih pemula, pasti lebih menentukan lagi. Itulah sebabnya, dalam setiap pilkada, pemilih pemula menjadi “rebutan” berbagai kekuatan politik. Menjelang pilkada, partai politik atau peserta pilkada lainnya, bisaanya membuat iklan atau propaganda politik yang menarik para pemilih pemula. Mereka juga membentuk komunitas kalangan muda dengan aneka kegiatan yang menarik anak-anak muda, khususnya pemilih pemula. Tujuannya satu: agar para pemilih pemula tertarik dengan partai atau kandidat itu dan kemudian memberikan suaranya dalam pilkada untuk mereka sehingga mereka dapat mendulang suara yang signifikan dan meraih kemenangan.

Selain memiliki banyak kelebihan, seperti telah diuraikan secara singkat di atas, pemilih pemula juga memiliki kekurangan. Yakni mereka belum memiliki pengalaman memilih dalam pilkada. Karena belum punya pengalaman memilih dalam pilkada, pada umumnya banyak dari kalangan mereka yang belum mengetahui berbagai hal yang terkait dengan pemilihan kepala daerah. Misalnya untuk apa pilkada diselenggarakan, apa saja tahapan

pilkada, siapa saja yang menjadi peserta pilkada, apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi peserta pilkada, siapa saja yang boleh memilih dalam pilkada, apa itu partai politik dan sebagainya. Mereka juga tidak tahu bahwa suaranya sangat berarti bagi proses politik di daerahnya. Bahkan tidak jarang mereka enggan berpartisipasi dalam pilkada dan memilih ikut-ikutan tidak mau menggunakan hak pilihnya alias golongan putih (golput).

Kenyataan tersebut, ternyata merembes di kalangan peserta didik. Para peserta didik yang masih bingung dengan “apa”, ”bagaimana” dan untuk apa sebenarnya pemilihan kepala daerah, menjadi sasaran empuk para elit politik demi kepentingan jabatan yang dituju. Dari hasil wawancara penulis dengan salah seorang panwaslu kabupaten Tapanuli Selatan, mengemukakan banyak para siswa SMA yang dijadikan sebagai alat oleh para elit politik untuk mendapatkan suara. Dengan sedikit uang, siswa memberikan hak pilih mereka sesuai dengan kemauan para elit politik, bukan berdasarkan pertimbangan yang sesuai dan setara sebagai pemilih.

Secara psikologis, pemilih pemula memiliki karakteristik yang berbeda dengan orang-orang tua pada umumnya. Misalnya kritis, mandiri, independen, anti status quo atau tidak puas dengan kemapanan, pro perubahan dan sebagainya. Karakteristik itu cukup kondusif untuk membangun komunitas pemilih cerdas dalam pemilu yakni pemilih yang memiliki pertimbangan rasional dalam menentukan pilihannya. Misalnya karena integritasnya, track record-nya atau program kerja yang ditawarkan.

Situasi yang terjadi pada pemilih pemula tersebut apabila dibiarkan tentunya akan menghambat proses peningkatan kualitas demokrasi yang sedang dilaksanakan oleh negara Indonesia, karena bagaimanapun juga demokrasi memerlukan pemilih yang cerdas untuk berpartisipasi. Seperti yang dikemukakan oleh Huntington (1982 : 56) bahwa model demokrasi terbaik meliputi tiga tahap substansial, yakni tahap pertama perumusan dan pengembangan identitas nasional, tahap kedua pengembangan pranata atau kelembagaan politik yang efektif, dan tahap ketiga adalah partisipasi politik. Pemilih pemula harus didorong untuk dapat memposisikan dirinya sebagai pemilih yang memiliki kecakapan partisipatoris, karena bagaimanapun juga mereka merupakan generasi penerus bangsa yang akhirnya dapat menumbuhkan suatu budaya politik karena sikap politiknya.

“Berdasarkan hasil survei sementara penulis di salah satu SMA Negeri di Kabupaten Tapanuli Selatan menunjukkan 65% pemilih pemula belum mengetahui secara persis tahapan dan sistem pemilu. Tidak hanya itu, sebanyak 40% tidak tahu jumlah peserta pilkada di Kabupaten Tapanuli Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketertarikan pemilih pemula untuk berpartisipasi pada pilkada 2010 lalu masih sangat rendah. Sikap ini terlihat dari 75% pemilih pemula menyatakan tidak bersedia turut serta dalam kegiatan kampanye” (Hasil Survei pada salah satu SMA Negeri di Kab. Tapanuli Selatan: 5-10 Juli 2012).

Berdasarkan dari data survei di atas, pendidikan politik bagi pemilih pemula merupakan keniscayaan yang tak bisa dihindari. Padahal disekolah, para siswa telah dibekali pengetahuan sistem demokrasi di Indonesia melalui pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang diajarkan oleh Guru. Di dalamnya juga disinggung tentang demokrasi dan mungkin juga tentang

pilkada. Tetapi karena tidak secara spesifik, pengetahuan tentang pilkada tidak secara mendetail dibahas Guru PKn.

Budimansyah (2007:190) mengemukakan warga negara dan masyarakat yang demokratis harus memfokuskan pada pendidikan dan pembekalan akan kecakapan-kecakapan yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dan bertanggung jawab, efektif, dan ilmiah.

Senada dengan pernyataan tersebut Khairon (1999:14) mengungkapkan sebagai berikut :

Di alam demokrasi sekarang ini warga negara tidak cukup mempunyai bangunan pengetahuan politik atau aspek-aspek politik, tetapi juga membutuhkan penguasaan terhadap kecakapan-kecakapan intelektual atau berpikir kritis, yakni : a) Kemampuan mendengar; b) Kemampuan mengidentifikasi dan mendeskripsikan persoalan; c) Kemampuan menganalisis; dan d) Kemampuan untuk melakukan suatu evaluasi isu-isu publik; Kecakapan Partisipatoris mencakup : a) Keahlian berinteraksi (*interacting*); b) Keahlian memantau (*monitoring*) isu publik, c Keahlian mempengaruhi kebijakan publik.

Oleh karena itulah, penting bagi kamu untuk mendapatkan pendidikan politik yang secara spesifik ditujukan bagi pemilih pemula, seperti kamu dan teman-temanmu. Dalam pendidikan pemilih pemula akan disampaikan arti penting suara kamu dalam pemilu, berbagai hal yang terkait dengan pemilu, seperti fungsi pemilu, sistem pemilu, tahapan pemilu, peserta pemilu, lembaga penyelenggara pemilu dan sebagainya. Tujuannya agar kamu dan pemilih pemula pada umumnya memahami apa itu pemilu, mengapa perlu ikut pemilu dan bagaimana tatacara menggunakan hak pilihmu dalam pemilu. Setelah kamu memahami berbagai persoalan pemilu diharapkan kamu menjadi pemilih yang cerdas yakni pemilih yang sadar

menggunakan hak pilihnya dan dapat memilih pemimpin yang berkualitas demi perbaikan masa depan bangsa dan negara.

Apabila dikaitkan dengan, pembelajaran PKn di sekolah, salah-satunya pada materi pokok demokrasi, prinsip-prinsip pelaksanaan demokrasi di Indonesia menjadi bahan pembelajaran. Namun materi pokok tersebut seolah-olah hanya tinggal dalam buku saja. Banyak diantara para siswa yang belum paham soal pelaksanaan demokrasi yang seutuhnya. Seperti yang ditemukan penulis di SMA Negeri 1 Batang Angkola di Kabupaten Tapanuli Selatan, dari hasil grand tour penulis, dari lima siswa yang ditanyai soal pelaksanaan demokrasi di Kabupaten Tapanuli Selatan, tiga siswa menjawab belum paham, dan dua siswa mengemukakan pelaksanaan pilkada tidak sesuai dengan UU demokrasi sebagaimana yang tertuang dalam buku ajar PKn. (Hasil observasi tanggal 17 September 2012).

Oleh sebab itu, dengan adanya pemilih pemula yang cakap, maka dapat mengubah kebiasaan partai politik, misalnya menolak mobilisasi massa yang selama ini masih menjadi kebiasaan parpol dalam berkampanye untuk menjaring massa, pemberian uang dengan imbalan terlibat dalam politik, karena mereka memiliki hak pilih dan diikutsertakan sebagai pemilih.

Fenomena tersebut menurut hemat penulis, menggambarkan betapa sistem demokrasi yang telah di rusak oleh segala bentuk elit saat ini, khususnya di Kabupaten Tapanuli Selatan. Apabila hal tersebut terus-menerus berlanjut maka negara akan dikendalikan oleh orang-orang yang tidak punya moral, dan kemungkinan terjadi disintegrasi bangsa, dimana telah

kita lihat bagaimana, Aceh, Maluku, Papua memberontak untuk berpisah dari NKRI yang tercinta.

Oleh sebab itu para siswa khususnya yang telah mendapat hak pilih, sangat perlu memahami bagaimana seharusnya menggunakan haknya sebagai warga negara, terutama yang sudah bisa menggunakan hak pilihnya sebagai warga masyarakat Indonesia dalam Pilkada. Saat ini ada sebanyak 70% pemilih pemula SMA Negeri 1 Batang Angkola, di Tapanuli Selatan yang sudah bisa mengikuti hak pilihnya dalam pemilu, Sebagaimana disebutkan diatas sebagian mereka telah salah menggunakan hak pilih mereka, Dari itu penulis tertarik melakukan penelitian ini.

Selama ini, berdasarkan data yang diperoleh penulis, saat melakukan studi pendahuluan ke kantor KPU Kab. Tapanuli Selatan, penulis melihat gambaran hasil Pilkada Bupati Tapanuli Selatan tahun 2010, sekitar 37% dari jumlah keseluruhan 12.130 siswa yang sudah berhak ikut dalam pemilu tidak menggunakan hak pilihnya (Arsip KPUD Tapanuli Selatan. 2010).

Melihat gambaran tersebut dapat disimpulkan bahwa, para siswa di Kabupaten Tapanuli Selatan belum memahami bagaimana selayaknya menjadi anggota warga negara khususnya dalam menggunakan hak pilih dalam Pilkada. Dalam Hal ini penulis ingin mengkaji *“Bagaimana para siswa memandang Pilkada dalam konteks pelaksanaan Demokrasi khususnya dalam pemilihan kepala daerah?”*.

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas, banyak hal yang menentukan persepsi siswa terhadap pemilihan kepala daerah, dalam hal ini di kategorikan kedalam dua bagian secara umum, Dalam hal ini yang mempengaruhi persepsi dari dalam diri individu, yang mencakup beberapa hal antara lain :

1. Perhatian, fokus perhatian peserta didik yang masih rendah terhadap Pilkada.
2. Minat peserta didik masih rendah untuk memahami sistim politik Pilkada.
3. Sosial Pilkada masih sangat minim.
4. Pengalaman dan Pemahaman siswa masih sangat rendah untuk mengikuti proses Pilkada.

Faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi individu merupakan ukuran dan penempatan dari obyek atau stimulus peserta didik, Warna dari obyek-obyek, Keunikan dan kontrasan stimulus persepsi, Intensitas dan kekuatan dari stimulus persepsi.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengajukan perumusan masalah pokok penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Persepsi peserta didik terhadap pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kabupaten Tapanuli Selatan?

2. Bagaimana persepsi siswa tentang aturan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Tapanuli Selatan ?

D. Tujuan Penelitian

Secara umum, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana dan bagaimana Persepsi Peserta Didik Terhadap Pilkada Di Kabupaten Tapanuli Selatan. Tujuan umum tersebut dijabarkan kedalam tujuan secara khusus, yaitu:

1. Untuk mengetahui Persepsi Siswa tentang Pilkada di Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Untuk melihat kemauan siswa dalam mengikuti pilkada di kabupaten tapanuli selatan.
3. Mendeskripsikan dan menganalisis tentang bagaimana persepsi siswa terhadap tata aturan pelaksanaan pilkada di kabupaten tapanuli selatan.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara umum manfaat penelitian ini diharapkan dapat di gunakan sebagai bahan kajian dalam pembelajaran, terutama dalam pembelajaran ilmu PKn yang bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, pemahaman demokrasi dan persepsi pesertadidik dalam kegiatan pemilihan umum, khususnya dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi dibidang pendidikan dalam hal untuk membentuk warga negara, masyarakat dan peserta didik yang demokratis, bebas untuk menggunakan hak pilihnya dalam pilkada

2. Manfaat Praktis

- Bagi Lembaga Penyelenggara Pilkada: Sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk pengembangan pemahaman peserta didik dalam pendidikan demokrasi bagi generasi muda untuk kegiatan pilkada.
- Bagi Sekolah: Dapat memahami konsep-konsep dasar pilkada dan memberikan pembelajaran yang konkrit, sehingga peserta didik mampu sebagai obyek juga subyek dalam mengaktualisasikan politik pilkada.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan penelitian sebagaimana dikemukakan pada bab sebelumnya, dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemilih pemula mempersepsikan Pilkada langsung sebagai mekanisme pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota yang melibatkan partisipasi rakyat secara langsung. Pilkada langsung ini diyakini mampu menumbuhkembangkan pendalaman proses demokratisasi di tingkat lokal. Dibandingkan dengan sistem penunjukkan atau sistem perwakilan, Pilkada langsung lebih menjamin berjalannya elemen-elemen demokrasi seperti partisipasi yang lebih terbuka, kompetisi dan kebebasan sipil.
2. Pilkada langsung dapat membuka akses peningkatan kualitas demokrasi di tingkat lokal, karena Pilkada langsung dinilai sebagai perwujudan pengembalian hak-hak dasar masyarakat di daerah dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam rangka rekrutmen pimpinan daerah sehingga mendinamisir kehidupan demokrasi di tingkat lokal.
3. Pemilih pemula mengemukakan persoalan-persoalan Pilkada langsung yaitu adanya potensi konflik dan *money politics*. Pilkada langsung sering dianggap sebagai pesta demokrasi rakyat, dalam pengertian negatif, dimana rakyat berhak untuk berbuat apa saja, termasuk tindakan-

tindakan anarki, baik yang inisiatif sendiri maupun dimobilisasi oleh pihak lain.

4. Dalam pelaksanaan Pilkada langsung di Kabupaten Tapanuli Selatan, teridentifikasi beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, yaitu kendala yang muncul dari masyarakat pemilih, peserta, penyelenggara, dan kendala yang muncul terkait dengan teknis penyelenggaraan Pilkada langsung.
5. Faktor utama yang diperhatikan oleh pemilih pemula adalah sifat dan karakteristiknya. Dengan adanya pilkada Kabupaten Tapanuli Selatan menimbulkan harapan-harapan pemilih pemula bahwa pilkada akan menciptakan kepala daerah yang aspiratif dan mampu memperjuangkan keinginan masyarakat.
6. Pilkada langsung dapat menghasilkan kepala daerah yang aspiratif yaitu yang dapat menyalurkan aspirasi rakyat dan menghasilkan pemimpin yang lebih akuntabel. Dengan pilkada langsung rakyat dapat menentukan pilihannya berdasarkan kepentingan dan penilaian atas calon.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dirumuskan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam rangka menggali dan mengkaji isu-isu publik, termasuk Pilkada langsung, maka kepada pemilih pemula disarankan untuk membangun kompetensi intelektual, termasuk kemampuan berpikir kritis melalui pendalaman bidang studi, diskusi, seminar dan lokakarya, yang dapat

dilakukan melalui organisasi siswa (OSIS)

2. Berkenaan dengan Pilkada langsung, maka disarankan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pendidikan pemilih pemula perlu dilakukan dengan orientasi kegiatannya diarahkan agar pemilih pemula mengetahui, mengerti dan menyadari arti penting Pilkada langsung bagi kehidupan mereka, sehingga akan mendorong dan meningkatkan partisipasi aktif bagi pemilih pemula.
 - b. Perlu dibangun kesamaan pandangan diantara peserta Pilkada langsung bahwa Pilkada langsung adalah sebagai metode, prosedur atau cara untuk meraih kualitas dan substansi demokrasi, dengan tujuan utamanya untuk terbentuknya kepemimpinan daerah yang akuntabel. Dengan pemahaman ini, diharapkan peserta Pilkada langsung memiliki sikap mental untuk siap kalah dan siap menang dalam pelaksanaan Pilkada langsung.
 - c. Perlu disusun mekanisme rekrutmen penyelenggara Pilkada langsung yang bersih, transparan, akuntabel, dan tidak memihak, sehingga peran dan fungsi Pilkada langsung sebagai akses untuk tumbuhnya demokratisasi politik di daerah dapat tercapai.
3. Berkaitan dengan partisipasi politik pemilih pada pilkada, mengusulkan pemberdayaan publik terutama bagi pemilih pemula agar menjadi pemilih yang kritis dan dapat meningkatkan kualitas pilkada melalui tiga tahap yaitu:

- a. *Voters Information* atau pendidikan pemilih lebih kearah informasi teknis pemilu, misalnya, tata cara pencoblosan, tempat, tanggal memilih, dan syarat-syarat pemilih.
 - b. *Voters Education*, yakni pemberdayaan pemilih telah memasuki tahap-tahap filosofis, sosiologis, psikologis, dan arti penting suatu pemilu, serta partisipasi publik dalam sistem demokrasi.
 - c. *Civics Education* atau pemberdayaan publik sebagai entitas politik mempertimbangkan hak-hak asasi warga negara dalam suatu sistem demokrasi.
4. Disarankan kepada KPUD Kabupaten Tapanuli Selatan dan para calon Bupati beserta tim pemenangnya pemilihan calon Bupati agar lebih aktif bersosialisasi dan memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya yang telah diberikan oleh KPUD dengan berbagai cara untuk menginformasikan para calonnya berkaitan dengan visi misi, program kerja, ataupun pentingnya melakukan pencoblosan sehingga keinginan untuk berpartisipasi politik secara lebih aktif bagi pemilih pemula secara perlahan akan meningkat.
5. Penelitian ini dilakukan terbatas pada pemilih pemula di satu sekolah, oleh karena itu kepada peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas wilayah penelitiannya, sehingga data yang terkumpul dapat memperkuat kesimpulan hasil penelitian.

DAFTAR RUJUKAN

- Abubakar, Suardi, dkk, 2005. *Kewarganegaraan: Menuju Masyarakat Madani*, Jakarta; Ghalia Indonesia.
- Almod dan Verba.(1990). *Budaya Politik; Tingkah Laku politik Dan Demokrasi Di Lima negara*. Bumi Aksara.
- Almond, Gabriel. dan Verba, Sidney. (1990). *Budaya Politik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Almond, Grabiell A. Dan Sidney Verba, terj., Sahat Simamora, 1990. *Budaya Politik, Tingkahlaku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Althoff, Phillip. dan Rush, Michael. (2005). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Amirudin dan Bisri, Zaini A. (2006). *Pilkada Langsung: Problem dan Prospek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bambang (2004). "*Menggagas Partisipasi Aktif Guru dalam Peta Politik Indonesia*" di Bandung dalam seminar).
- Basrowi dan Suwandi. (2008). *Memahami Peneletian Kaulitatif*. Rineka Cipta.
- Budimansyah, Dasim dan Suryadi, Karim. (2008). *PKN dan Masyarakat Multi*
- Branson, Margaret S. (1998). The Role of Civic Education : A Forthcoming Education Policy Task Force Position Paper from the Communitarian Network, Wasihington, DC : Center fort Civic Education.
- Budiarjo, 1997. *Masalah Akuntability Dalam Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia.
- Budiarjo, Meriam, 1992. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Budiarjo, Miriam. (2004). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Budiono, 1998. *Dampak Krisis Ekonomi dan Moneter Terhadap Pendidikan*, Jakarta: Pusat sains dan Teknologi Lembaga Penelitian UI.
- Budiono, Kusmohamidjojo dan Soerjanto, Poespowarojo. (1994). *Pendidikan Wawasan kebangsaan; Tantangan dan Dinamika Perjuangan kaum Cendikiawan Indonesia*.
- Center For Indonesia Civic Education/CICED. (1999). *Democratic Citizens in a Civic Society: Report of the Conference on Civic Education for Civic Society*. Bandung: CICED
- Cholisin. (2004). *Konsolidasi Demokrasi Melalui Pengembangan Karakter*